



KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN DESA SESAOT

**NOMOR 02 TAHUN 2019**

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SESAOT

TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SESAOT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 pada ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sesaot Tahun 2019 - 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sesaot tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

KABUPATEN LOMBOK BARAT  
PERATURAN DESA SESAOT  
**NOMOR 02TAHUN 2019**  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SESAOT TAHUN 2019-  
2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SESAOT ,

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SESAOT

dan

KEPALA DESA SESAOT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
SESAOT TAHUN 2019 - 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat .
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat .
3. Desa adalah Desa Sesaot
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksuddalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

#### DESA SESAOT

##### Pasal 2

DenganPeraturan Desa iniditetapkanRencanaPembagunanJangkaMenengah Desa Sesaot Tahun2019- 2025, sebagaimanatercantumdalamlampiranPeraturan Desa ini.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 3

- (1) RencanaPembangunanJangkaMenengah Desa Sesaot Tahun2019 - 2025disusundenganmaksuduntukmenjabarkanvisi dan misiKepalaSesaot terpilihhasilPemilihanKepala Desa pada BulanDesember 2018 dan telahdilantik pada tanggal 15Februari 2019.

(2) Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sesaot Tahun 2019 – 2025 adalah :

1. Agar  
desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang  
berkesinambungan dalam waktu enam tahun dengan menyesuaikan pembangunan kecamatan maupun desa.
2. Sebagai pedoman kegiatan pembangunan Desa Sesaot
3. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Sesaot

#### Pasal 4

RPJM Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

#### Pasal 5

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
  - c. Keuangan desa;
  - d. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 6

RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### BAB IV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Pada saat RPJMDes Tahun 2019 – 2025 belum tersusun, maka penyusunan RKPDes Tahun 2019 berpedoman pada RPJMDes serta mengacu pada RPJMD Kabupaten.

## BAB V PENUTUP

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Sesaot

Ditetapkan di Sesaot  
pada tanggal 2019  
KEPALA DESA SESAOT

Yuni Hari Seni, S.Pd

Diundangkan di Desa Sesaot  
Pada tanggal 2019  
SEKRETARIS DESA SESAOT

SAPARUDIN

Lembaran Desa Sesaot Tahun 2019 Nomor 02  
Noreg Perdes Desa ...., Kabupaten Lombok Barat : (     /2019)

## LAMPIRAN



PERATURAN DESA SESAOT  
KECAMATAN NARMADA KABUPATEN  
LOMBOK BARAT  
NOMOR 02 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA SESAOT ,  
KECAMATAN NARMADA, KABUPATEN  
LOMBOK BARAT TAHUN 2019- 2025

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Landasan Hukum; dan
- 1.3 Tujuan.

**BAB II PROFIL DESA**

- 2.1 Kondisi Desa
  - 2.1.1 Sejarah Desa;
  - 2.1.2 Demografi
  - 2.1.3 Keadaan Sosial
  - 2.1.4 Keadaan Ekonomi
- 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
  - 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
  - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
- 2.3 Data Sumber Daya Desa
  - 2.3.1 Data Sumber Daya Alam
  - 2.3.2 Data Sumber Daya Manusia
  - 2.3.3 Sumber Daya Pembangunan
  - 2.3.4 Sumber Daya Sosial dan Budaya

**BAB III VISI MISI KEPALA DESA;**

- 3.1 Visi Kepala Desa
- 3.2 Misi Kepala Desa

**BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMB DESA;**

- 4.1 Arah Kebijakan Pembangunan dan Arah Kebijakan Keuangan Desa.
- 4.2 Strategi Pembangunan Desa
  - 4.2.1 Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal; Faktor Penentu Keberhasilan;
  - 4.2.2 Strategi Pembangunan Desa; Analisis Skala Prioritas; Tujuan Pembangunan Desa; dan Sasaran Pembangunan Desa.

**BAB V DATA POTENSI DAN MASALAH;**

- 5.1. Data Masalah desa
  - 5.1.2 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - 5.1.3 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - 5.1.4 Bidang Pembinaan Masyarakat;
  - 5.1.5 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 5.2 Data Potensi dan Masalah
  - 5.2.2 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- 5.2.3 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 5.2.4 Bidang Pembinaan kemasyarakatan;
- 5.2.5 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 5.2.6 Bidang Penanggulangan Bencana, Kondisi darurat dan mendesak

## **BAB VI RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA**

- 6.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 6.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 6.3 Bidang Pembinaan kemasyarakatan;
- 6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 6.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Kondisi darurat dan mendesak

## **BAB VII PENUTUP;**

- 71. Kesimpulan;
- 72. Saran.

## **Lampiran-Lampiran**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latarbelakang**

BahwaberdasarkanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa, bahwaDesa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentangAturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa, sehinggadipandangperluuntukdilakukan review penyusunanRencana Pembangunan JangkaMenengahDesa (RPJMDes).

Landasanpemikirandalampengaturanmengenaidesaadalahkeanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaanmasyrakat. Berdasarakandasarpemikiranthersubut, bahwadesaberwenangmenguruskepentinganmasyarakatsetempatbedasarkanasalul sul dan adatistiadatssetempat yang di akui dan didibentukdalamsisitempemerintahannasional dan berada di desa/kota, makadesawajibmempunyaiperencanaan yang matangdalampenyelenggaraanpemerintahan dan pembangunanberdasarkanpartisipasi dan trasnpransisertademokrasi yang berkembangdi desa yang di tuangkandalamrencanapembangunanjangkamenengahdesa (RPJMdes) enamtahunataupunrencanakerjapemerintahandesas (RKPDdes) untuksatutahun.

RPJMDesainimerupakanRencanastrategisDesaSesaot untukmencapaitujuan dan cita-citadesa. RPJMdestersebutnantinyaakanmenjadidokumenperencanaan yang menyesaikanperencanaanpembangunan di tingkatdesa, karenaperencanaanpembangunandesas dan perencanaandaerahmerupakansatukesatuansistem.

#### **1.2. LandasanHukum**

1. Undang-undangnomor 23 tahun 2002 tentangperlindungananak
2. Undang-undangnomor 26 tahun 2004 tentangsistemperencanaanpembangunan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 tentang keterbukaan informasi publik.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peransertamasyarakat dalam penyelenggaraan Negara.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no 06 tahun 2014 tentang desa.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.

#### 1.2 Tujuan dan Manfaat

Penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) Desa Sesaot ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Tujuan RPJM Desa

###### a. Agar

desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu enam tahun dengan menyelaraskan pembangunan kecamatan maupun desa.

###### b. Sebagai pedoman kegiatan pembangunan Desa Sesaot

###### c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Sesaot

##### 2. Manfaat RPJM Desa

###### a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan desa

###### b. Sebagai rencana induk pembangunan desa Sesaot yang merupakan acuan pembangunan desa selama enam tahun

###### c. Pemberian arah seluruh kegiatan pembangunan di desa

###### d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah

###### e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat

#### 1.3. Hubungan RPJM desa dengan dokumen perencanaan lainnya.

1. Perencanaan pembangunan Jangka panjang kabupaten Lombok barat tahun 2005-2025 RPJM Desa Sesaot Kecamatan Narmada tahun 2019 mengacu dan menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang kabupaten tahun 2019-2025.

2. Perencanaan pembangunan Jangka Menengah kabupaten Lombok barat tahun 2019-2025 RPJM Desa Sesaot Kecamatan Narmada tahun 2019 mengacu dan menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah kabupaten tahun 2019-2025.

#### 1.4. Sistematika RPJM Desa

Rencana jangka menengah Desa (RPJM Desa) desa Sesaot kecamatan Narmada tahun 2019-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.4 Latar belakang;  
1.5 Landasan Hukum; dan  
1.6 Tujuan.

## BAB II      PROFIL DESA

- 2.4 Kondisi Desa
  - 2.4.1 Sejarah Desa;
  - 2.4.2 Demografi
  - 2.4.3 Keadaan Sosial
  - 2.4.4 Keadaan Ekonomi
- 2.5 Kondisi Pemerintahan Desa
  - 2.5.1 Pembagian Wilayah Desa
  - 2.5.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
- 2.6 Data Sumber Daya Desa
  - 2.6.1 Data Sumber Daya Alam
  - 2.6.2 Data Sumber Daya Manusia
  - 2.6.3 Sumber Daya Pembangunan
  - 2.6.4 Sumber Daya Sosial dan Budaya

### **BAB III            VISI MISI KEPALA DESA;**

- ### 3.3 Visi Kepala Desa
- ### 3.4 Misi Kepala Desa

## **BAB IV            ARAH KEBIJAKAN PEMB DESA;**

- 4.3 Arah Kebijakan Pembangunan dan Arah Kebijakan Keuangan Desa.
- 4.4 Strategi Pembangunan Desa
- 4.4.1 Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal; Faktor Penentu Keberhasilan;
- 4.4.2 Strategi Pembangunan Desa; Analisis Skala Prioritas; Tujuan Pembangunan Desa; dan Sasaran Pembangunan Desa.

## BAB V DATA POTENSI DAN MASALAH:

- 5.2. Data Masalah desa
  - 5.2.7 BidangPenyelenggaraanPemerintahanDesa;
  - 5.2.8 BidangPelaksanaan Pembangunan Desa;
  - 5.2.9 BidangPembinaankemasyarakatan;
  - 5.2.10 BidangPemberdayaan Masyarakat Desa.
- 5.3 Data Potensi dan Masalah
  - 5.3.2 BidangPenyelenggaraanPemerintahanDesa;
  - 5.3.3 BidangPelaksanaan Pembangunan Desa;
  - 5.3.4 BidangPembinaankemasyarakatan;
  - 5.3.5 BidangPemberdayaan Masyarakat Desa.

5.3.6 Bidang Penanggulangan Bencana, Kondisi darurat dan mendesak

**BAB VI RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA**

- 6.6 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 6.7 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 6.8 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- 6.9 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 6.10 Bidang Penanggulangan Bencana, Kondisi darurat dan mendesak

**BAB VII PENUTUP;**

- 73. Kesimpulan;
- 74. Saran.

.

**BAB II  
PROFIL DESA**

**2.1 Kondisi Desa**

**2.1.1 Sejarah Desa Sesaot**

Desa Sesaot merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB yang berdirisejak tahun 1969. Pada awalnya terbentuknya Desa Sesaot terdiri dari 10 dusun meliputi:

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Dusun Gontoran    | 6. Dusun Ngis          |
| 2. Dusun Sesaot Lauk | 7. Dusun Batu Asak     |
| 3. Dusun Penangke    | 8. Dusun Karang Mejeti |
| 4. Dusun Sambik Baru | 9. Dusun Pembuwun      |
| 5. Dusun Sesaot Daye | 10. Dusun Repok Temas  |

Dengan batas-batas desa pada saat ini adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hutan Negara
- Sebelah Selatan : Desa Suranadi
- Sebelah Timur : Desa Lebah Sepage
- Sebelah Barat : Desa Batu Mekar

Kemudian pada tahun 2011 Desa Sesaot mekar menjadi dua desa yaitu Desa Sesaot dan Desa Buwun Sejati. Dan pada tahun 2011 juga desa Sesaot memekarkan dusun-dusunnya dari 5 dusun menjadi 6 dusun meliputi dusun-dusun setelah pemekarannya yaitu :

- 1. Dusun Gontoran,
- 2. Dusun Sesaot Timuk,
- 3. Dusun Sesaot Lauk

4. Dusun Penangke
5. Dusun SambikBaru,
6. Dusun Temas Lestari,

Denganbatas-batasdesayaitusebagaiberikut :

- Sebelah Utara : Hutan Negara
- Sebelah Selatan : DesaSuranadi
- Sebelah Timur : DesaPakuan
- Sebelah Barat : DesaBuwunSejati

AdapunKepalaDesa yang pernahmenjabathingga yang menjabatsampaisaatiniyaitusebagiberikut :

- Periode I Tahun 1969 – 1994 Dijabat oleh Bapak MUHAMMAD TAJUDIN.
- Periode II Tahun 1995 – 2001 di jabat oleh Bapak H. JUMADIL AWAL.
- Periode III Tahun 2002 – 2007 di jabat oleh Bapak M. ISHAK.
- Periode IV Tahun 2008 – 2013 dijabat oleh Bapak SUDIAH. S.H
- Periode V Tahun 2013-2019 di jabat oleh Ibu YUNI HARI SENI.S.Pd.
- Periode VI Tahun 2019-2025Sampaidengansekarang di jabat oleh Ibu YUNI HARI SENI.S.Pd.

### 2.1.2. Demografi

Pada akhirtahun 2018, DesaSesaotmemilikiJumlahpendudukkeseluruhan5.847jiwadenganjumlahpenduduk Laki – laki2.958jiwa, jumlahpendudukperempuansebanyak2.888jiwasertajumlahKepalaKeluargasebanyak 1.889KepalaKeluarga. Jumlahtersebuttersebar di 6 Dusun,denganrincianjumlahpenduduk di setiapdusun tertera pada tabelberikut :

**Tabel1 : JumlahPendudukPerdusun**

No.	Nama Dusun	JumlahPenduduk		
		Laki	Perempuan	Total
1	Gontoran	561	554	1.115
2	SesaotTimuk	533	417	950
3	SesaotLauk	475	554	1.029
4	Penangke	533	502	1.035
5	SambikBaru	513	501	1.014



6	Temas Lestari	343	361	704
Jumlah Total Penduduk		2.959	2.888	5.847

Sumber : Data Profil Desa Sesaot

### Klimatologi

Secara garis besar kondisi iklim di wilayah Desa Sesaot tidak jauh berbeda dengan kondisi iklim wilayah Kecamatan Narmada dan Kabupaten Lombok Barat secara umum yaitu dengan musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan April sampai dengan bulan September, dan musim hujan antara bulan Oktober sampai dengan Maret, dengan temperatur / suhu udara pada tahun 2018 berkisar antara 17,00°C sampai 33,80 °C dan suhu maksimum terjadi pada bulan Oktober dan Nopember dengan suhu 33,80 °C serta suhu minimum 17,00 °C yang terjadi pada bulan Agustus.

Tekanan udara yang ditanda dengan musim tersebut berkisar antara 1.009,20 mbs – 1.013,60 mbs. Sedangkan keadaan curah hujan pada tahun 2013 sebesar 174,92 mm dengan curah hujan terendah bulan September sebesar 0,00 mm dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember sebesar 472,00 mm.

### 2.1.3. Keadaan Sosial

#### Kesehatan Masyarakat

Untuk angka kematian ibu dan bayi dapat dinyatakan relatif kecil, bahkan dapat dikatakan nol, dikarenakan kader posyandu, bidan desa dan tenaga kesehatan secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat, baik di posyandu maupun di Poskesdes yang ada. Tenaga kesehatan yang ada sangat pro aktif dan peduli terhadap kesehatan masyarakat.

Desa Sesaot mempunyai 1 unit Poskesdes yang dikelola oleh Bidan Desa, serta di masing-masing dusun terdapat Posyandu, berikut nama-nama posyandu dan kader posyandu di masing-masing dusun.

1.	GONTORAN (POSYANDU MAWAR)	1	SITI ROHANI	Ketua
		2	ISLAMIAH	Sekretaris
		3	BAIQ DIANA	Anggota
		4	JUSNIATI	Anggota
		5	DESI SUSANTI	Anggota
2.	SESAOT TIMUK (POSYANDU WANATIRTA)	1	FATIMAH	Ketua
		2	WINDI LESTARI	Sekretaris
		3	NURHASANAH	Anggota

		4	NURHIDAYAH	Anggota
		5	ANDILIANI	Anggota
3.	SESAOT LAUK (POSYANDU MAYANG MEKAR)	1	YARNI	Ketua
		2	FATIMAH	Sekretaris
		3	SOFIANI	Anggota
		4	MARIA ULFA	Anggota
		5	LIA NOVIA ROSANTI	Anggota
4.	PENANGKE (POSYANDU PERMATA BUNDA )	1	ENI USMAWATI	Ketua
		2	INDAYANI	Sekretaris
		3	DINI FITRIANI	Anggota
		4	NURHAYATI	Anggota
		5	TRISNA AYU	Anggota
5.	SAMBIK BARU (POSYANDU MELATI)	1	DEVI IRIANI	Ketua
		2	ASRI PUSPAWATI	Sekretaris
		3	BAIQ MAORI	Anggota
		4	DESI MURNIATI	Anggota
		5	FARIDA WALFA	Anggota
6.	TEMAS LESTARI (POSYANDU AHA LESTARI)	1	ROHYANI DEWI	Ketua
		2	AMELIA ULFA	Sekretaris
		3	YULIANTI	Anggota
		4	SENIWATI	Anggota
		5	YULI ANDREANI	Anggota

### Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan di Desa Sesaot adalah tertera pada tabel berikut :

**Tabel 3 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Usia 3-6 Tahun yang Belum Masuk TK	119 Orang
Usia 3-6 Tahun Yang Sedang TK /Play group	Orang
Usia 18-56 Tahun yang tidak pernah sekolah	47

Usia 18-56 Tahun Pernah sekolah SD tetapi tidak Tamat	266	Orang
Tamat SD / Sederajat	963	Orang
Tamat SLTP	419	Orang
Tamat SLTA	450	Orang
Tamat D 1	31	Orang
Tamat D 2	14	Orang
Tamat D 3	40	Orang
Tamat S 1	135	Orang
Tamat S 2	1	Orang

Sumber : Data ProfilDesaSesaot

### Agama Penduduk

Desa Sesaot adalah Desa yang majemuk, terdiri dari 2 (Dua) etnis dan suku yang berbeda-beda. Adapun gambaran jumlah penduduk Desa Sesaot berdasarkan agama disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4 : Jumlah Penduduk Menurut Agama**

Menurut Agama	Jumlah
Islam	<b>5.846</b> Orang
Kristen	1 Orang
Katolik	- Orang
Budha	- Orang
Hindu	- Orang

Sumber : Data ProfilDesaSesaot

#### 2.1.4. Keadaan Ekonomi

##### Mata Pencaharian

Desa Sesaot merupakan Desa Pertanian serta menjadi daerah tujuan wisata (Obyek wisata alam) sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani/pekebun, buruh, pedagang dll, selengkapnya sebagai berikut :

**Tabel 5 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	Orang

Buruh tani		Orang
Pegawai Negeri Sipil	3	Orang
Pengrajin		Orang
TNI		Orang
POLRI	3	Orang
Pensiunan, TNI / POLRI		Orang
Peternak		Orang
Montir		Orang
Guru	6	Orang
Pedagang	111	Orang

Sumber : Data Profil Desa Sesaot

## 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa Sesaot

### 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa Sesaot

Desa Sesaot terbagi atas 6 dusun yang terdiri dari Dusun Gontoran, Sesaot Timuk, Sesaot Lauk, Penangke, Sambik Baru dan Temas Lestari.

**Tabel 6 : Pembagian Wilayah Administrasi Desa Sesaot**

No	Dusun	Banyaknya			Luas (Km <sup>2</sup> )
		Penduduk	JenisKelamin		
			Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6
1	Gontoran	1.115	561	554	
2	SesaotTimuk	950	533	417	
3	SesaotLauk	1.029	475	554	
4	Penangke	1.035	533	502	
5	Gambar. Peta Pembagian Wilayah AdministrasiDesaSesaot				
6	Temas Lestari	704	343	361	
Jumlah		5.847	2.959	2.888	

Sumber : Data Profil Desa Sesaot

### 2.2.2 Kondisi Organisasi Pemerintahan Desa

Organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat banyak yang tumbuh dan berkembang di Desa Sesaot yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi kontroling dan

patner dalam melaksanakan konsep pembangunan Pemerintah Desa Sesaot Ketersediaan Perangkat Desadengankualitas SDM yang bagusmenjadipenunjanguntukmeningkatkanpelayanan public yang *Cepat, Tepat dan Bermanfaat*. Stabilitas politik dan keamanan baikdalam masa PemilihanKepalaDesamaupundalamPascapemilihan legislative dan PemilihanPresiden relative kondusifhalinidikarenakanpendidikanpolitikmasyarakatcenderunglebih baikdaritahunketahun. BanyaknyaOrgansisasi Masyarakat dan LSMberimplikasi pada meningkatkansifatKegotongroyongan dalamkehidupanmasyarakat.

Organisasi Masyarakat di Desa Sesaot yang tumbuh dan berkembangnataralain :

NO.	Jenis Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Anggota	Keterangan
1.	BPD	7 Orang	Aktiv
2.	LPM	66 Orang	Aktiv
3.	BUMDes	11 Orang	Aktiv
4.	PKK	38 Orang	Aktiv
5.	LINMAS	36 Orang	Aktiv
	Total	158 Orang	

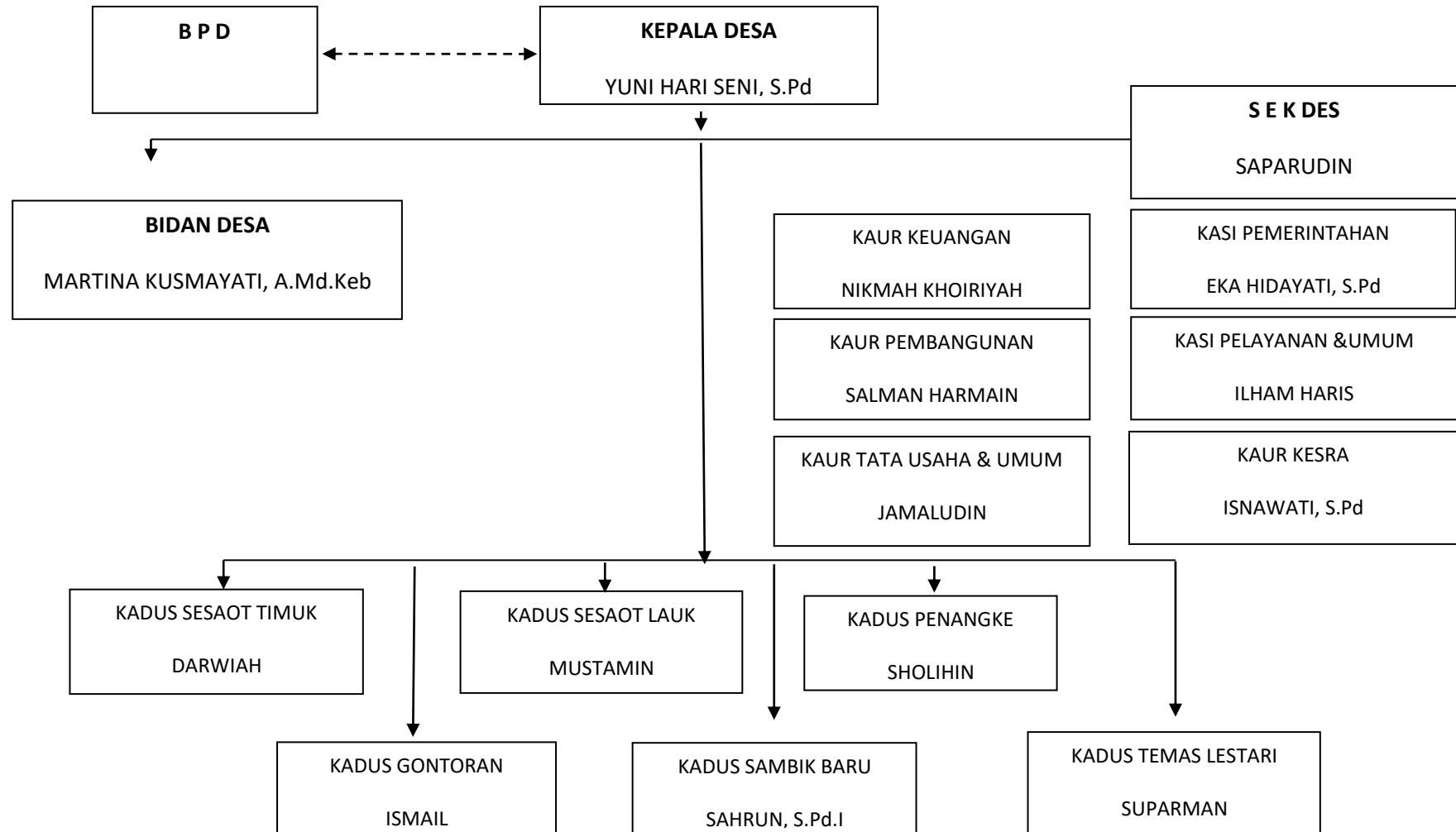
#### *Masalah*

:KurangoptimalnyaperansertaanggotaorganisasikemasyarakatanikutmelaksanakankonseppemberdayaandalampembangunanbaikInfrastrukturmaupundalammelaksanakanhasil-hasilpembangunan.



### 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sesaot

#### **STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SESAOT PERDA NO 6 TAHUN 2007**







## 2.3 Data Sumber Daya Desa

Untuk dapat menentukan arah kebijakan dan tindak lanjut untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada di desa perlu dilakukan pengkajian potensi dan masalah, dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk menganalisis suatu potensi dan masalah diperlukan keterlibatan semua komponen masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa yang mengedepankan suatu Perencanaan Pembangunan secara partisipatif, hal tersebut telah dilaksanakan sehingga setelah dilakukan proses melalui Penggalan Gagasan (Pagas) dengan menggunakan 3 alat kaji yaitu : Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Diagram Kelembagaan desa yang memuat Potensi dan Masalah.

### 1.3.1 Masalah

Keragaman Sumber Daya dan potensi yang dimiliki oleh Desa Sesaot sampai saat ini belum memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan dan perkembangan wilayah ini disebabkan pengelolaan, untuk itu hal kiranya perlu peran serta dan keterlibatan semua pihak sangat diharapkan. Pembangunan dan dukungan secara komprehensif merupakan suatu keharusan untuk mempercepat pembangunan dan pengelolaan potensi yang ada, sehingga mimpinya Desa Sesaot menjadi Wilayah desa yang maju akan dapat diwujudkan.

Proses penjaringan di dapat dari hasil pagas dan sisa hasil Pengkajian Kondisi Desa tahun lalu dengan metode P3MD yang menggunakan tiga alat kaji yang meliputi Peta Sosial, Kalender Musim dan Diagram Kelembagaan yang pada akhirnya akan didapatkan rekapitulasi masalah, potensi dan data penduduk dan RTM dalam KK termasuk dalam kegiatan pada proses MKP. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Desa Sesaot terkait potensi yang dimiliki digambarkan sebagai berikut :

#### 1. Permasalahan Pada Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam	Permasalahan
<u>Tanah persawahan :</u>	✓ Sarana irigasi

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ SawahIrigasi</li> <li>○ SawahIrigasi ½ teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hama/penyakit tanaman</li> <li>✓ Hasil produksi pertanian</li> <li>✓ Ketersediaan Pupuk</li> <li>✓ Legalitas kepemilikan</li> </ul>
<u>Tanah kering ;</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tegal / ladang</li> <li>○ Pemukiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rumah tidak layak huni</li> <li>✓ Penataan ruang belum serasi</li> <li>✓ Pemanfaatan pekarangan</li> <li>✓ Kebersihan lingkungan</li> </ul>
<u>Tanah Perkebunan ;</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tanah Perkebunan Rakyat</li> <li>○ Tanah Perkebunan Negara</li> <li>○ Tanah Perkebunan Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemasaran hasil</li> <li>✓ Peningkatan nilai jual</li> <li>✓ Hasil produksi perkebunan</li> <li>✓ Legalitas kepemilikan</li> </ul>

## 2. Permasalahan Pada SumberDayaManusia

SumberDayaManusia	Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ KeterampilanPenduduk</li> <li>○ Pendidikan Penduduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keterampilan kurang</li> <li>✓ Minat berusaha lemah</li> <li>✓ Kesadaran akan arti penting pendidikan kurang</li> </ul>

## 3. Permasalahan Pada Kelembagaan

N O	LEMBAGA	MASALAH
1	PEMDES	Kurangterampil
2	BPD	
3	BUMDES	Kurang modal, belummaksimalpengelolaan
4	LPM	Anggotakurangaktif
5	RW	Saranatidaklengkap
6	RT	Saranatidaklengkap
7	SPP	Kurang modal
8	KelompokTani	Sarana dan prasaranabelummemadai
9	Kelompok Banjar	Sarana dan prasaranabelummemadai

10	KelompokUsaha Keripik	Kekurangan modal
11	Posyandu	Kader seringberganti, kurangterampil, belumadateempatpelayanan dan fasilitas pelayanan belum lengkap
12	KelompokDodol	Kurang modal
13	KelompokTernak	Kurang modal
14	KelompokRemaja Masjid	AnggotaKurangAktif
15	KelompokPemuda	Kurang Modal
16	AsosiasiJasaPariwisataSes aot (AJPS)	Anggotabanyakbelum lengkapmengantongiper ijinan
17	Club Olahraga	Kekurangansarpras

#### 4. IssuStrategis

Strategipembangunandesamerupakanrumusanlangkah – langkahstrategisdenganmengoptimalkanpotensi dan peluang yang adasertamengatasikelemahan internal dan tantanganeksternalpembangunan di desauntukmenjaminterlaksananyaamisi dan tercapainyavisipembangunandesadesa. Dengandemikiandapatdimaknaibahwastrategimenjembatanivisidenganreal itas yang ada.

Berdasarkantujuan dan sasaranpembangunan yang telahditetapkan, dapatdirumuskanissu – issustrategispembangunandesadesa 5 (lima) tahunkedepan, yang diklasifikasikandalam, sebagaiberikut :

##### 1. AspekKesejahteraanMasyarakat

Yang terkait dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat, issu strategis yang berkembang antara lain :

- Gangguan kamtibmas bernuansa SARA masih berpotensi terjadi
- Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi masyarakat
- Masih banyaknya masyarakat yang tidak bekerja (pengangguran)
- Masih tingginya angka buta huruf
- Masih banyaknya perumahan penduduk yang tidak layak huni

##### 2. Aspek Pelayanan Umum

- a. Masih banyaknya anak melahirkan yang tidak ditolong tenaga kesehatan
- b. Masih adanya Ibu Hamil Resti dan Kekurangan Energi Kronik (KEK)
- c. Masih adanya kasus Bayi dengan status Gizi Buruk

### 3. Aspek Kemandirian

No	Issue Strategis Yang berkembang	Strategi pencapaian	Arah Kebijakan
1	Masih kurang optimalnya pemanfaatan potensi yang ada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.</li> <li>2. Meningkatkan pelayanan pendidikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan keterampilan untuk memanfaatkan sertamengolah potensi-potensi yang ada.</li> <li>2. Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia.</li> </ol>
2	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan alam sekitar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelayanan kesehatan.</li> <li>2. Meningkatkan peranhangizi Masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan Pelayanan kesehatan bagi lansia.</li> <li>4. Meningkatkan Kesehatan lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan rasa cinta terhadap lingkungan rumahsertalingkungansekitar.</li> <li>2. Peningkatan pemahaman bahwa pentingnya lingkunganbagikelangsunganhidup masa depan.</li> </ol>
3	Kurang optimalnya pelayanan pendidikan masyarakat dan tingginya angka buta aksara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pendidikan.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan peran lembaga terkaitsertalembaga yang ada desagunameningkatkan pelayanan pendidikan agar pelayanan pendidikan dapat meratasertamenakutkan seluruh masyarakat</li> </ol>

		<p>dikan.</p> <p>3. Melanjutkan program Keaksaraan Fungsional lanjutan.</p> <p>4. Melaksanakan kampanye / sosialisasi / penyuluhan pendidikan.</p>	<p>.</p> <p>2. Membangun sarana prasarana penunjang pelayanan pendidikan.</p>
4	Masih rendahnya tingkat keterampilan masyarakat baik di bidang Usaha Ekonomi Produktif.	<p>1. Melaksanakan pelatihan keterampilan sesuai potensi yang ada.</p> <p>2. Membentuk kelompok usaha ekonomi produktif.</p> <p>3. Mendorong perkembangan kelompok usaha ekonomi produktif.</p> <p>4. Mengupayakan bantuan peralatan bagi kelompok UEP.</p>	<p>1. Pengembangan keterampilan untuk memanfaatkan sertamengolah potensi-potensi yang ada.</p> <p>2. Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia.</p> <p>3. Meningkatkan Pelatihan dan pelatihan tentang keterampilan masyarakat.</p>
5	Rendahnya derajat kesehatan dan status gizimasyarakat.	<p>1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.</p> <p>2. Meningkatkan pelayanan penanganan masalah sosial.</p> <p>3. Mendorong pemanfaatan lahan / pekarangan</p>	<p>1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat .</p> <p>2. Meningkatkan gizimasyarakat.</p> <p>3. Membangun sarana serta prasarana penunjang pelayanan kesehatan.</p>
		masyarakat untuk kebangkitan	

		eluarga.  4. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan masyarakat.	
6	Rendahnya pertumbuhan- buhan ekonomi dan tingginya angkakemiskinansertapengangguran.	1. Mendorong pertumbuhankelompokekonomikecil/mikro dan menengah. 2. Melakukan pelatihan- pelatihan dalam pening- katan Manajemen Usaha masyarakat. 3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukungperkembanganusahaekonomimasyarakat	1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber modal, sarana prasarana ekonomi. 2. Peningkatan pelatihan – pelatihan manajemen usaha.
7	Masih belum optimalnyadayatari kdaerah bagi investor terutama sektor andalan.	1. Penataan tempat- tempat wisata alam 2. Melakukan pengelolaan pariwisata secara profesional. 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran POKDARWIS.	1. Mengoptimalkan potensi yang ada sehingga investor tertarik. 2. Meningkatkan promosi serta kerja sama dengan investor.

8	Masih rendahnya produktivitas dan produksi pertanian dalam arti luas (meliputi peternakan, perkebunan) serta rendahnya Nilai Jual Petani.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pembinaan kelompok tani.</li> <li>2. Meningkatkan pembinaan sarana pertanian.</li> <li>3. Meningkatkan produksi ternak.</li> <li>4. Meningkatkan produksi tanaman perkebunan.</li> <li>5. Meningkatkan kuantitas tanaman penghasil pangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan.</li> </ol>
9	Masih rendahnya peran sertamasyarakat dan lembaga desa yang ada dalam pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pelatihan tentang pelaksanaan tugas masing-masing lembaga desa.</li> <li>2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mengakses informasi tentang desa.</li> <li>3. Menyusun perencanaan pembangunan bersama lembaga desa.</li> <li>4. Meningkatkan pengawasan oleh BPD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan fungsi dan peran Lembaga Pemerintahan Desa sesuai tugas masing-masing</li> <li>2. Meningkatkan peran BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa</li> </ol>
10.	Masih kurangnya perhatian terhadap sarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun tata ruang wilayah desa dan pemanfaatannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengelompokan status dan nama jalan dan gang</li> <li>2. Meningkatkan kualitas</li> </ol>

	dan prasarana transportasi – Jalan Desa dan Dusun.	. 2. Penamaan jalan dan gang sewilayah desa 3. Melakukan perbaikan sarana dan prasarana transportasi. 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi jalan. 5. Membuka jalan/ gang baru sesuai kebutuhan masyarakat. t.	prasarana jalan desa dan jalan dusun
--	---	---	---

### **BAB III**

### **VISI MISI DESA**

Memperhatikan kondisi umum potensi dan beberapa permasalahan yang ada, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Des ) maupun pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa tentunya memerlukan perencanaan yang matang meliputi : jenis kegiatan, volume, lokasi, estimasi sumber pendanaan, estimasi biaya, volume yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan desa agar sesuai dengan harapan masyarakat secara umum.



Peran serta masyarakat tentu sangat menentukan kesuksesan setiap program atau rencana pembangunan terutama dalam proses perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pelestarian hasil pembangunan. Semua proses yang dijalankan direncanakan melalui musyawarah di tiap-tiap dusun, baru kemudian digabungkan untuk diplenokan di tingkat desa, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara umum dan merupakan prioritas yang berpihak pada masyarakat luas tanpa mengabaikan kepentingan minoritas. Hal ini merupakan realisasi visi dan misi dari Kepala Desa beserta jajarannya.

#### **4.1. Visi dan Misi**

##### **4.1.1. Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sesaot ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sesaot seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan seluruh anggota masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti situasi kerja wilayah pembangunan di Kecamatan dan Kabupaten adalah bidang perekonomiannya yaitu bagaimana mendorong untuk tumbuh dan berkembangnya sektor usaha ekonomi mikro di desa, dan Desa Sesaot merupakan daerah tujuan wisata yang sudah tentu harus menyiapkan produk unggulan murni penduduk desa sebagai oleh-oleh khas, maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Sesaot adalah :

**“Mewujudkan desa Sesaot sebagai desa wisata yang Religius, Berbudaya, dan Mandiri”**

##### **4.1.2. Misi**

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Sesaot, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Sesaot adalah :

01. Mencetak Masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa melalui program-program keagamaan;
02. mengembangkan budaya lokal melalui pengembangan nilai kesenian dan kebudayaan;
03. menumbuhkan jiwa gotong royong masyarakat
04. membentuk dan mengembangkan lembaga adat;
05. meningkatkan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas publik;
06. Meningkatkan hubungan kemitraan dalam pengembangan wisata desa;

07. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis masyarakat;
08. Meningkatkan peran pemerintah desa dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab
09. Meningkatkan pengembangan potensi SDM dan memanfaatkan Potensi SDA berdasarkan kelayakan lingkungan
10. Menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan

## PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

No	Issue Strategis Yang berkembang	Arah Kebijakan	Strategi pencapaian	Indikator Kinerja
1	Masih kurang optimalnya pemanfaatan potensi yang ada.	1. Tersedianya data-data potensidesa yang dapat dikelola untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat	a. Menginventarisir potensi-potensi yang ada baik berasal dari sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia	a. Tersedianya data potensidesa
			b. Memaksimalkan fungsi lembaga yang ada dalam memanfaatkan potensidesa	b. Berfungsinya lembaga-lembaga yang ada di desa
		2. Meningkatnya produktifitas produk sumberdaya alam	a. Melakukan intensifikasi dan diversifikasi produk sumberdaya alam	a. Tersedianya produk sumberdaya alam yang berkualitas dan memenuhi standar pasar
		3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	a. Melakukan pelatihan-pelatihan masyarakat	a. Tersedianya sumberdaya manusia yang terampil dan produktif
		1. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat	a. Fasilitasi, edukasi dan revitalisasi tempat-tempat ibadah	a. Fasilitas tempat ibadah terpelihara dan nyaman
			b. Melakukan pembinaan keagamaan melalui pengajian umum dan pertemuan-pertemuan dalam acara keagamaan	b. Terwujudnya masyarakat yang taat beragama
2	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan alam sekitar			

		2. Peningkatan rasa cinta terhadap lingkungan rumah serta lingkungan sekitar.	a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan PHBS	a. Berubahnya perilaku masyarakat ke perilaku hidup yang bersih dan sehat
				b. Kesehatan masyarakat meningkat
			b. Melaksanakan pengelolaan sampah	b. Kebersihan lingkungan terjaga
		3. Peningkatan pemahaman bahwa pentingnya lingkungan bagi kelangsungan hidup masa depan.		c. Terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat
			a. Membentuk persepsi tentang perlindungan hutan dan mata air	a. Terbentuknya persepsi perlindungan hutan dan mata air
				b. Terwujudnya pelestarian sumber mata air
			c. Meningkatkan peran kelompok pembibitan tanaman penyangga hutan	a. Keberlangsungan usaha kelompok pembibitan
				b. Tersedianya berbagai jenis tanaman penyangga
			d. Melaksanakan penghijauan	a. Terjaganya kelestarian alam
			e. Melakukan penanaman tanaman produktif di pinggir jalan	a. Terwujudnya jalan yang sehat, bersih dan asri
				b. Menambah daya tarik wisata
3.	Belum terpenuhinya hak-hak yang menjadi kebutuhan dasar bagi pendidikan masyarakat	1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan PAUD/TK, SD, SMP dan SMA yang layak dan berkualitas	a. Melakukan inventarisasi potensi penduduk, baik yang berupa sumber daya manusia ataupun sumber daya alam	a. Tersedianya data tentang potensi desa dalam bidang pendidikan
				b. Adanya data siswa dan data

	akat				tenagapengajar					
					c.	Data Inventariskebutuhansarana KBM				
					b.	Advokasipenganggaranmelaluidina sterkait dan stimulasiAPBDes	a.	RekomendasiDinasDikbud		
							b.	TerakomodirdalampebiayaanAP BDesberdasarkansumberpendap atandesa yang syah dan relevan		
					2.	Terdatanyasiswaterancamputus sekolah dan putusantarjenjangpendidikan	a.	Melakukankoordinasidengandinast erkaitdalam mempersiapkananggar andalampelaksanaankegiatanpendi dikanbagimasyarakatsecaramerata.	a.	Adanya data siswa yang pernahataubelummendapatkanba ntuan program (BOS,PKH,dll) (sumber data : Sekolah,GSC,Pendamping PKH)
					3.	Mendukungpayapemerintahpro pinsi dan kabupatendalamrangkamencap aiAngkaButaAksaraMenjadiNol	a.	Mengupayakanterlaksananyakegiat an program KeaksaraanFungsional (KF) secaraberkelanjutan	a.	Terbentukkelompokbelajar dan terlaksananyakegiatanbelajar KF
b.	Tingginyapartisipasi / minatwargabelajar									
c.	Kemampuancalistung, 90 % warga yang masuk program KF cukupbaik / lancar									
				a.	Menjalinkomunikasi dan koordinasidenganinstansiterkait dan pengelolasecaraberkesinambungan	a.	Adanyapembinaanlanjutanpening katankapasitaswargabelajar (dalambentukpembinaan home industri)			
4	Masih rendahnyaingkatketera	1.	Pengembanganketerampilanunt ukmemanfaatkansertamengolah	a.	Mengupayakanbantuanpermodalan	a.	Tersedianyasumber dana dan permodalanusaha			

	mpilan masyarakat di bidang Usaha Ekonomi Produktif.	potensi-potensi yang ada.	b.	Mendorong perkembangan kelompok usaha ekonomi produktif.	a.	Terbentuknya kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif
			c.	Mengupayakan bantuan peralatan bagi kelompok UEP.	a.	Tersedianya sarana prasarana pengembangan Kelompok UEP.
		2. Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia.	a.	Melaksanakan pelatihan keterampilan sesuai potensi yang ada.	a.	Meningkatnya kualitas SDM
5	Rendahnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	a.	Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya.	a.	Tersedianya sarana prasarana pelayanan medis di dan Polindes
		2. Meningkatkan gizi masyarakat.	a.	Mengupayakan penanganan masalah sosial.	a.	Tertanganinya masalah sosial
		3. Terantusiasnya ibu resti dan tidak adanya kematian bayi - ibum melahirkan serta bayi-balita sehat	a.	Melakukan pengawasan, monitoring dan melakukan intervensi terhadap kegiatan pelayanan sesuai kompetensi yang dimiliki serta melakukan advokasi melalui instansi terkait bila diperlukan	a.	Terlaksananya pengawasan yang intensif terhadap bumil, bulin, bayi dan balita
6	Masih banyak masyarakat / keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni dan lingkungan kumuh, serta belum didukung infr	1. Masyarakat miskin dapat memiliki Rumah Tinggal yang layak huni dan memiliki fasilitas rumah sederhana yang sehat	a.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang penanganan rumah tinggal (Bappeda, BPMPD, Dinsos)	a.	Terlaksananya program rehabilitasi rumah kumuh
					b.	Tersentuhnya masyarakat miskin dari layanan dasar (listrik, air bersih)

	struktur permukiman yang memadai	2. Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan	a. Menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan gotong royong kebersihan (Program Jum'at Bersih)	a. Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan
7	Masih belum optimalnya daya tarik daerah bagi investor terutama sektor andalan .	1. Mengoptimalkan potensi yang ada sehingga investor tertarik.	a. Penataan tempat-tempat wisata alam	a. Tertatanya kawasan wisata alam
		2. Meningkatkan promosi serta kerja sama dengan investor.	a. Melakukan pengelolaan pariwisata secara profesional.	a. Meningkatkan kunjungan wisata
			b. Mengoptimalkan fungsi dan peran POKDARWIS.	b. Meningkatnya SDM pelaku wisata
8	Masih rendahnya produktivitas dan produksi pertanian dan peternakan (meliputi peternakan, perkebunan) serta rendahnya Nilai Jual Petani.	1. Meningkatkan produktivitas masyarakat dalam pengelolaan hasil produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan.	a. Meningkatkan pembinaan kelompok tani.	a. Meningkatkan peran pengurus kelompok tani
			b. Meningkatkan pembangunan sarana pertanian.	a. Meningkatkan sarana infrastruktur pertanian
			c. Meningkatkan produksi ternak.	a. Lebih berkualitasnya dan meningkatnya kuantitas ternak
			d. Meningkatkan produksi tanaman perkebunan.	a. Meningkatkan hasil produksi perkebunan
			e. Meningkatkan kuantitas tanaman penyanggahan.	a. Semakin banyaknya variasi tanaman perkebunan penyanggahan
9	Masih rendahnya peran serta masyarakat dan lembaga desa yang	1. Memaksimalkan fungsi dan peran Lembaga Pemerintahan Desa sesuai tugas dan fungsi	a. Melakukan pembinaan dan pelatihan tentang pelaksanaan tugas masing-masing lembaga desa.	a. Meningkatnya SDM lembaga desa
				b. Berperan aktifnya lembaga desa yang ada

	adadalam pembangunan.	nyamasing-masing	b.	Memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mengakses informasi tentang desa.	a.	Tersedianya jaringan informasi desa secara terbuka dan menyeluruh	
					b.	Adanya kemudahan masyarakat umum mengakses informasi desa	
		2. Meningkatkan peranan BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa	a.	Menyusun perencanaan pembangunan bersama lembaga desa.	a.	Adanya dokumen perencanaan pembangunan	
			b.	Meningkatkan pengawasan oleh BPD	a.	Terlaksananya program pembangunan sesuai rencana	
			c.	Menyusun tata ruang wilayah desa dan pemanfaatannya.	a.	Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terarah	
10.	Masih kurangnya perhatian terhadap sarana dan prasarana transportasi – Jalan Desa dan Dusun.	a.	Melakukan pengelompokan status dan nama jalan dan gang	a.	Penamaan jalan dan gang di wilayah desa	a.	Memudahkan pengenalan wilayah
		b.	Meningkatkan kualitas prasarana jalan desa dan jalan dusun	b.	Melakukan perbaikan sarana dan prasarana transportasi.	a.	Tersedianya sarana infrastruktur jalan/gang dan jembatan yang memadai
			c.	Membuka jalan/gang baru sesuai kebutuhan masyarakat.	a.	Terlaksananya penyusunan pola tata ruang wilayah	



**BAB IV**  
**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa Sesaot kecamatan narmada selama periode tahun 2019-2025. Oleh karena itu, substansi RPJM Desa mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan desa, dan meliputi seluruh fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sesuai dengan cakupan kewenangan yang ada pada pemerintah desa, strategi yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa Sesaot Tahun 2019-2025 meliputi 4 agenda pokok, yaitu :

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang baik;
- 2) Meningkatkan kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat; dan
- 3) Meningkatkan Peran serta kelembagaan masyarakat dan
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

Keempat agenda tersebut akan terealisasi melalui strategi pembangunan desa. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program.

4.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa

Dalam era otonomi daerah, setiap desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah daerah dan pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desanya masing-masing.

*Prediksi pendapatan desa  
Desa Sesaot kecamatan narmada tahun 2019-2025*

Uraian pendapatan	Tahun						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pendapatan asli desa	0	0	0	0	0	0	0
Dana Desa							
Bagi Hasil Pajak dan retribusi							
Alokasi Dana Desa							
Hibah							
Bantuan keuangan							
Sumbangan							

pihak ketiga							
Pendapatan desa							

4.2.1 Arah kebijaka pengelolaan pendapatan desa

Kebijaka keungan desa tahun 2019-2025 yang merupakan potensi desa dan sebagai peneriman desa persak sesuai urusannya diserahkan mealui upaya peningkatan pendapatan desa dari sektor pendapatan asli desa dan dana pembangunan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk meningkatkan pendapatan desa adalah:

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan desa.
2. Meningkatkan pendapatan desa dengan intesifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan desa.
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya peningkatan konstribusi secara signifikan terhadap pendapatan desa;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memayar pungutan desa;
6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keunagn desa.

4.2.2 Arah kebijakan belanja desa

Arah kebijakan belanja desa ini bertujuan unuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja desa diupayakan dengan pengaturan pada pembelanjaan yang proposional, efisien, dan efektif antara lain melalui;

1. Esensi utama penggunann dana APB desa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu sksn terus dilakukan peningkatan program-program yang beorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja desa tepat waktu dengan mendorong penetapan perdes APBdes secara tepat waktu;
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja desa maalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sisitem pelaoran yan makin akuntabel;
3. Penggunann anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi desa.

4. Alokasi anggaran desa *indikatif* Berdasarkan kemampuan keuangan desa, visi, misi, arah kebijakan pembangunan desa serta prioritas kegiatan maka kebijakan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut;

*Prediksi alokasi indikatif belanja desa  
Desa Sesaot kecamatan naramda tahun 2019-2025*

Uraian belanja	Tahun						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Belanja desa							
Belanja langsung							
1.Belanja bidang penyelngaranan desa							
2.Belanja bidang pelaksanaan pembangunan							
3.Belanja bidang Pembinaan Masyarakat							
4.Belanja bidang pemberdayaan masyarakat							
Belanja tidak langsung							
1.Belanja Pegawai							
2.Belanja hibah							
3.Belanja subsidi							
4.Belanja bantuan sosila							
5.Belanja bantuan keuangan							
6.Belanja tak terduga							

4.2.3 Arah kebijakan pembiayaan desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBdes di mungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapaan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk mnutup defisit diperlukan pembiayaan desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman desa, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan, dan penjumlahan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib antara lain untuk pembayarn hutang pokok yang telah jatuh tempo, setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMdes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk mrningkatkan

pelayanan kepada masyarakat, disamping itu penyertaan modal BUMDes atau pinjaman pihak ketiga juga di prioritaskan bagi pengusaha kecil menengah di desa diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapatkan tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

#### **4.1 Analisis Strategi Pembangunan Desa**

##### **5.1 Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal**

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh pemerintahan desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan; dan
2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

##### **5.2 Faktor Penentu Keberhasilan, Strategi, tujuan dan sasaran Pembangunan Desa Serta analisis skalaproiritas;**

###### **1. Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik**

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Persak Tahun 2019-2025 perlu dilaksanakannya implementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

###### **2. Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah :

- a. Minimnya PADesa
- b. Minimnya penghasilan aparatur pemdes
- c. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal;
- d. Kualitas SDM aparatur pemerintah desa masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan;
- e. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjawab tuntutan reformasi;
- f. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum masih relatif kurang.

###### **3. Sasaran**

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Terlaksananya peningkatan PADesa
- b. Tercapainya peningkatan kesejahteraan aparatur pemdes
- c. Terlaksananya pengelolaan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
- d. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur desa sesuai tuntutan dinamika perubahan dan kebutuhan;
- f. Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat.

### 3. Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana tersebut di atas, akan ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan prosentase belanja desa yang bersifat produktif guna meningkatkan PADesa
- b. Meningkatkan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain aparatur pemdes;
- c. Meningkatkan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
- d. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum;
- f. Melaksanakan fasilitasi penataan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Meningkatkan Kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat merata dan berkeadilan

Untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Persak Tahun 2019-2025, perlu dilaksanakannya implelementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

### 1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT adalah sebagai berikut :

- a. Pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata;
- b. Kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat yang terbatas
- c. Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat yang belum optimal

- d. Kondisi perekonomian masyarakat yang rentan perubahan guncangan sosial.

## 2. Sasaran

Dengan prioritas pembangunan ini, diharapkan akan dapat dicapai sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pemahaman agama dalam kehidupan nyata;
- b. Terwujudnya kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c. Terwujudnya Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat
- d. Terwujudnya Kondisi perekonomian masyarakat yang lebih baik.

## 3. Kebijakan

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah :

- a. Meningkatnya pemahaman agama dalam kehidupan nyata;
- b. Meningkatnya kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat
- c. Meningkatnya Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat
- d. Meningkatnya Kondisi perekonomian masyarakat.

## 3. Meningkatkan Pembinaan Masyarakat yang berkembang

Untuk mewujudkan peningkatan kemandirian masyarakat dibutuhkan peningkatan peran kelembagaan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Sesaot Tahun 2019-2025, perlu dilaksanakannya implemementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pembangunan pemberdayaan masyarakat.

### 1. Permasalahan

Permasalahan mendasar dalam upaya peningkatan peran kelembagaan masyarakat adalah :

- a. Rendahnya kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
- b. Rendahnya fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

### 2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
- b. Terwujudnya optimalisasi peran/fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

### 3. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran tersebut, adalah

- a. Meningkatkan kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
- b. Meningkatkan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

#### 4. Agenda Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk percepatan upaya pembangunan desa, dibutuhkan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan meningkatkan kemampuan, peran serta masyarakat serta kemandirian masyarakat dalam upaya pembangunan desa

##### 1. Permasalahan

Permasalahan mendasar dalam upaya peningkatan peran kelembagaan masyarakat adalah belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat

##### 2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu enam tahun ke depan adalah Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

##### 3. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran tersebut, adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa

**BAB V**  
**DATA POTENSI DAN MASALAH**

- 5.3. Data Masalah desa
  - 5.3.7 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa;
  - 5.3.8 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - 5.3.9 Bidang Pembinaan kemasyarakatan;
  - 5.3.10 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 5.4 Data Potensi dan Masalah
  - 5.4.2 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa;
  - 5.4.3 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - 5.4.4 Bidang Pembinaan kemasyarakatan;
  - 5.4.5 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  - 5.4.6 Bidang Penanggulangan Bencana, Kondisi darurat dan mendesak



**BAB VI**  
**RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA**

- 6.11 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 6.12 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 6.13 Bidang Pembinaan kemasyarakatan;
- 6.14 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 6.15 Bidang Penanggulangan Bencana, Kondisi darurat dan mendesak

**BAB VI**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

Berdasarkan strategi pembangunan yang telah diuraikan tersebut, yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, dan setelah menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai unsur yang meliputi tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan komponen masyarakat lainnya, maka telah ditetapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 Program-program pembangunan yang telah ditetapkan pada hakekatnya merupakan garis-garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat mencapai sasaran jangka pendek atau melalui RKP-Desa tahunan, sehingga secara kumulatif selama lima tahun ke depan akan terwujudlah visi desa.

Sesuai dengan kedudukan RPJM Desa sebagai panduan dan rujukan dalam pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waktu lima tahun ke depan, maka program-program pembangunan yang telah ditetapkan harus menjadi rujukan dalam penyusunan RKP Desa tahunan.

Visi dan Misi Kepala Desa Sesaot adalah :”

**6.1. Kaidah pengelolaan**

Keterbukaan dan tanggungjawab merupakan kunci sukses pembangunan baik jangka pendek, maupun jangka menengah, mengingat dengan terciptanya keterbukaan, maka efisiensi, efektivitas, akurasi dan akuntabilitas pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban akan terwujud.

Rencana pembangunan jangka menengah Desa ( RPJM-Des ) Perubahan Desa Sesaot tahun 2014 – 2018 diharapkan sebagai acuan perwujudan visi, misi dan program – program pembangunan kepala Desa terpilih. Penyusunan RPJM-Des Perubahan ini mengacu kepada RPJM Kabupaten Lombok Barat 2014-2018, dengan tujuan agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergian antara fingsip pemerintah Daerah dan pemerintah Desa.

Kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Des ) perubahan Desa Sesaot tahun 2014-2018 antara lain bahwa dokumen RPJM-Des Perubahan ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja pembangunan Desa ( RKP-Des ) setiap tahunnya dalam periode yang sama. Disamping itu, RPJM-Des Perubahan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa ( LPPD ), laporan keterangan pertanggungjawaban ( LKPJ ) dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa ( ILPPD ) setiap akhir tahun dan akhir masa jabatan ( AMI ) dan menjadi dasar bagi BPD dan masyarakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa.

Namun demikian, keberhasilan pembangunan di Desa Sesaot sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat serta sikap, mental, etika, tekad dan semangat serta ketaatan para penyelenggara pemerintah Desa.

Keberhasilan pembangunan jangka menengah Desa Sesaot dalam mewujudkan Visi “” perlu didukung oleh :

- 1) Komitmen dari kepemimpinan Kepala desa yang kuat dan demokratis
- 2) Konsistensi kebijakan Pemerintah Desa
- 3) Keberpihakan pembangunan pada masyarakat
- 4) Peran serta Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa Sesaot
- 5) Menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan desa.

Maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisikékosongan perencanaan pembangunan, maka RPJM-Des perubahan Desa Sesaot tahun 2014-2018 ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKP-Des dan rancangan APB-Des tahun 2020 yang merupakan tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Desa terpilih periode berikutnya.

## 6.2 Penetapan Indikator Kinerja

Indikator – indikator yang ditetapkan dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Desa Sesaot dalam kurun waktu tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

### 6.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

- a) Pertumbuhan Perekonomian masyarakat (%)
- b) Persentase Penduduk dibawah garis kemiskinan (%)
- c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

#### 2. Fokus Kesejahteraan Sosial

- a) Angka Buta Aksara (%)
- b) Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
- c) Angka Harapan hidup (Tahun)
- d) Angka Partisipasi Kasar (%) : Paud, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.
- e) Angka Partisipasi Murni (%) : Paud, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.
- f) Angka Kematian Ibu
- g) Angka Kematian Bayi
- h) Persentase penduduk yang memiliki Lahan (%)
- i) Angka Penduduk yang bekerja (%)

#### 3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

- a) Jumlah Group Kesenian
- b) JumlahGeroupOlahraga

### **6.2.2. AspekPelayanan Dasar**

#### **1. Kesehatan**

- a. Cakupankunjunganibuhamil K4
- b. CakupanPertolonganPersalinan
- c. CakupanKunjunganBayi (%)
- d. CakupanPelayananAnakbalita(%)
- e. CakupanbalitagiziburukMendapatPerawatan(%)
- f. Cakupanpemberianmakanantambahan (PMT)Bayibalita
- g. Persentaserumah tanggapengguna air bersih9%)
- h. Cakupanrujukanpasienmasyarakatmiskin(%)

#### **2. Pendidikan**

- a. PersentaseAnakusia 4-6 tahun yang mengikuti program pendidiks PAUD / TK
- b. Persentase Pendidikan Anakusia SD/MI
- c. Persentase Pendidikan AnakUsia SMP
- d. PersentaseAngkaAnakputusSekolah SD/MI
- e. PersentaseLulusan SD/MI yang melanjutkanKe SMP/MTS
- f. PersentaseAngkaAnakPutussekolah SMP/MTS
- g. PersentaseLulusan SMP/MTs yang melanjutkanKe SMA/SMK/MA
- h. Persentase Pendidikan AnakUsia SMA/SMK/MA
- i. Persentasependudukusia 15-45 tahun yang bisamembaca dan menulis
- j. JumlahButaaksarausia 15-45 tahun

#### **3. PekerjaanUmum**

- a. Panjang jalan ( Km )
- b. Persentasepanjangjalankondisinyabai (%)
- c. Persentasejembatankondisibai (%)
- d. Persentesaluran/drainase/gorong-gorongkondisibai (%)
- e. Persentasepanjangjaringanirigasi (%)

#### **4. Perumahan**

- a. cakupanketersediaanrumahlayakhuni (%)
- b. jumlah areal pemakaman yang terpeliharadenganbai ( Unit )

#### **5. Penataanruang**

- a. jumlahbangunantempatibadahkondisibai ( unit )
- b. Jumlah

#### **6. Perencanaanpembangunan**

- a. Jumlahdokumenperencanaanpembangunandes 5 ( lima ) tahun ( unit )

- b. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan desa 1 ( satu ) tahun ( unit )

## **7. Lingkungan Hidup**

- a. Persentase pengelolaan sampah (%)

## **8. Pertanahan**

- a. Persentase luasan tanah bersertifikat

## **9. Kependudukan dan catatansipil**

- a. Persentase kepemilikan akte kelahiran (%)
- b. Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%)
- c. Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga (%)

## **10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Jumlah Kasus KRT ( Kasus )
- b. Cakupan anak yang berhadapan hukum yang mendapat perlindungan/ restorasi justice ( kasus )

## **11. Keluarga Berencana ( KB ) dan Keluarga Sejahtera**

- a. Cakupan usia subur usia dibawah 20 tahun (%)
- b. Cakupan usia subur menjadi peserta KB aktif (%)
- c. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita( BKB ) yang ber KB (%)

## **12. Sosial**

- a. Peserta PMKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar ( % )
- b. Peserta PMKS yang mendapatkan bantuan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama atau sejenis (%)

## **13. Ketenagakerjaan**

- a. Rasio penduduk yang bekerja (5)
- b. Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)
- c. Tingkat pengangguran (%0

## **14. Koperasi dan Usaha Mikro**

- a. Jumlah usaha kecil dan menengah (Unit)
- b. Persentase koperasi aktif (%)

## **15. Kebudayaan**

- a. Jumlah kelompok seni ( unit )

## **16. Kepemudaan dan Olahraga**

- a. Jumlah kelompok pemuda yang produktif ( kelompok )

## **17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

- a. Tingkat partisipasi pemilu dalam pemilu (%)
- b. Jumlah Linmas ( orang )

## **18. Otonomi Desa, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Desa, Perangkat Desa**

- a. Persentase pelaksanaan Fungsi BPD
- b. Jumlah perdes yang ditetapkan ( buah )

- c. Waktu penyelesaian buku APBDes ( bulan )

**19. Ketahanan pangan**

- a. Penguatan cadangan pangan

**20. Pemberdayaan masyarakat**

- a. Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan (%)
- b. Persentase penyandang Aktif (%)

**21. Statistik**

- a. Buku profil Desa / tingkat perkembangan desa (buah)

**22. Kearsipan**

- a. Persentase arsip yang diolah dengan baik (%)

**23. Komunikasi dan Informasi**

- a. Jumlah SDM yang berkeahlian teknologi informasi

**24. Perpustakaan**

- a. Jumlah pengunjung perpustakaan desa ( pengunjung )
- b. Jumlah koleksi ( rekam dan cetak ) perpustakaan desa

**6.2.3. Aspek Pelayanan Lainnya**

**1. Pertanian**

- a. Nilai tukar hasil pertanian
- b. Produk tanaman pangan utama : Padi, Rambutan, Durian, Pisang, Ubi Kayu, ubi Jalar,
- c. Produk tanaman hortikultura utama : caberawit,
- d. Jumlah kelompok tani.

## Rencana

Adapun program-program pembangunan yang merupakan visi dan misi tersebut, dikelompokkan dalam agenda pokok pembangunan, yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan di desa Sesaot

### A. Agenda Mewujudkan Pemerintahan yang baik

Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya misi ini adalah reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun program-program guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah :

1. Program peningkatan prosentase belanja desa yang bersifat produktif guna meningkatkan PADesa
2. Program peningkatan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain aparatur pmdes;
3. Program Penataan dan peningkatan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
4. Program Pembinaan dna peningkatan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
5. Program peningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum;
6. Program melaksanakan fasilitasi penataan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. siltap dan tunjangankepaladesa dan perangkatdesa;
8. insentif RT dan RW sertaoperasionalnya;
9. tunjangan dan operasional BPD
10. operasionalpemerintahandesad an  
operasionalkelembagaanmasyarakatdesa;
11. pengembanganpembangunansaranaperkantoranpemerintahandes;
12. peningkatanpenyelenggaraanmusrenbangdes;
13. peningkatanpenyelenggaraanmusyawarahdesa;
- 14.penetapanPeraturanDesa, PeraturanKepalaDesa dan Keputusan KepalaDesa

### B. Agenda Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Kehidupan Masyarakat

Program Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kecerdasan dan kualitas SDM yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat adalah :

1. Program peningkatan pemahaman agama dalam kehidupan nyata;
2. Program peningkatan kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat
3. Program peningkatan Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat
4. Program peningkatan Kondisi perekonomian masyarakat.
5. pembangunan pemenuhan kebutuhan dasar;
6. pembangunan sarana dan prasarana desa;
7. pengembangan potensi ekonomi lokal
8. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
9. pembangunan kelestarian lingkungan hidup;
10. pembangunan sarana pendidikan.

#### C. Agenda Meningkatkan Peran Kelembagaan Masyarakat

Program yang dilaksanakan dalam mencapai Agenda peningkatan peran kelembagaan masyarakat dilaksanakan melalui dua pendekatan program, yakni :

1. Program peningkatan kualitas kemampuan/ketrampilan sumber daya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
2. Program peningkatan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.
3. pembinaan kelembagaan masyarakat;
4. pengembangan sarana prasarana pendidikan pra sekolah/usia dini;
5. pembangunan sarana prasarana olahraga;
6. pengembangan kebudayaan;
7. pengembangan sarana prasarana keagamaan
8. peningkatan kerukunan umat beragama;
9. peningkatan pelayanan masyarakat;

#### D. Agenda Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk percepatan upaya pembangunan desa, agenda yang akan dilaksanakan adalah Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain:

- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
  - b. Pelatihan teknologi tepat guna
  - c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa
  - d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
  - e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
  - g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
  - h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
  - i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
- 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa



- 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
- 3) Kelompok Perempuan
- 4) Kelompok Tani
- 5) Kelompok Masyarakat Miskin
- 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
- 7) Kelompok perlindungan anak
- 8) Kelompok Pemuda
- 9) Kelompok Kesenian
- 10) Kelompok Keagamaan
- 11) Kelompok Simpan Pinjam
- 12) Kelompok Tenaga Pengajar
- 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

## **BAB VII PENUTUP**

### **7.1 Kesimpulan;**

RPJM Desa Sesaot Tahun 2019-2025 merupakan panduan bagi penyusunan RKP Desa tahunan selama kurun waktu enam tahun ke depan. Dokumentasi RPJM Desa ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena arah penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan akan menentukan bagaimana kondisi masyarakat Desa .... pada waktu yang akan datang. Sebagai penjabaran visi dan misi kepala desa, dokumen ini harus menjadi panduan dan pedoman dalam penyusunan RKP-Desa tahunan.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di tengah keterbatasan poternsi sumber daya pembangunan yang dimiliki, maka berbagai strategi dan inovasi yang dilakukan untuk membangun desa, akan kurang berarti tanpa dukungan dan peranserta berbagai pihak. Oleh karena itu, dukungan dan peranserta seluruh masyarakat sangat diharapkan.

### **7.2 Saran**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Sesaot memuat agenda – agenda, isu strategis dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasil pembangunan selama Kepala Desa menjabat diharapkan mampu membawa masyarakat Desa Sesaot menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Desa Sesaot

Ditetapkan di Sesaot  
pada tanggal 2019

KEPALA DESA SESAOT

Yuni Hari Seni, S.Pd

Diundangkan di Desa Sesaot

Pada tanggal 2019

SEKRETARIS DESA SESAOT

SAPARUDIN

Lembaran Desa Sesaot Tahun 2019 Nomor 02

Noreg Perdes Desa ...., Kabupaten Lombok Barat : ( /2019)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

